

Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik

ISSN: 2088-1274

Vol. 1 | No. 2

Korupsi dalam Budaya Konsumen Politisi *Rente*

Faisyal Chaniago*

* Universitas Bung Karno, Jakarta

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Politics rents, Consumer culture, Function of political parties.</p>	<p><i>The behavior of some politicians Indonesia in the category rent seeking behavior. Type politicians like this is called politics rents - in politics use power to influence the economic process. As a result, the economic cost is high and and the quality is low. Because, production cost partially taken for political or rentier politicians. Addition to lowering production quality, politics rent undermine political, endanger democracy and development - where development quality not making any good. Consumer culture and decreasing function of political parties, the cause of the birth of politics rents.</i></p>
<p>Corresponding Author: Faisyal_chaniago@yahoo.com</p> <p>Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik Volume 1 Nomor 2 Juni-Desember 2015 ISSN 2088-1274 hh. 117-136 ©2015 MJP. All rights reserved.</p>	<p>Perilaku beberapa politisi Indonesia dalam kategori menyewa perilaku mencari. Jenis politisi seperti ini disebut politik sewa - dalam politik menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses ekonomi. Akibatnya, biaya ekonomi tinggi dan dan kualitas rendah. Karena, biaya produksi sebagian diambil untuk politisi politik atau rente. Selain menurunkan kualitas produksi, sewa politik melemahkan politik, membahayakan demokrasi dan pembangunan - di mana kualitas pembangunan tidak membuat baik. budaya konsumen dan penurunan fungsi partai politik, penyebab kelahiran sewa politik.</p>

Pendahuluan

Sejak reformasi digulirkan, sampai sekarang masalah korupsi (Baswir, 1999) tak kunjung tuntas. Ibarat penyakit, korupsi di Negeri ini sudah seperti kanker stadium empat – yang sulit disembuhkan. Namun, bukan berarti kita pasrah dan pesimis atas penyakit mematikan (korupsi) tersebut. Seganas apapun kanker tetap harus disembuhkan. Dari ditanjuah

sejarah, korupsi bukanlah fenomena baru. Sejak zaman *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* korupsi sudah ada. Bahkan karena korupsi VOC mengalami kebangrutan total pada 1799. Enam tahun kemudian, karena kebangrutan VOC pun dibubarkan. 13 Desember 1799 VOC meninggalkan utang 134 juta gulden. Uang hasil korupsi itu digunakan untuk membangun vila-

vila mewah baik di sekitar kastil (Pasar Ikan), maupun di 'luar kota' seperti Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada (Shahab, 1998).

Salah satu tuntutan reformasi adalah membersihkan Indonesia dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang berselama ini bersemayam di Indonesia. KKN sudah menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Tidak hanya merusak sendi-sendi ekonomi, KKN juga menghambat laju pembangunan dan merusak budaya politik, serta tatanan hidup bernegara. Pada tataran praktis, korupsi membuat perpolitikan menjadi tidak bermoral dan liar. Politik tanpa nilai, seolah-olah menjadi pegangan para politisi.

Zaman Orde Baru korupsi hanya berada di sekitar lingkaran penguasa. Sekarang korupsi sudah erada di luar lingkaran penguasa. Sampai lapisan bawah, yaitu RT/RW dan kelurahan korupsi sudah terjadi. Malah ada kesan, korupsi menjadi hal wajar – hingga Muctar Lubis menyebutnya korupsi sudah menjadi budaya. Begitu pula pada politisi. Kekuasaannya dimilikinya dijadikan sebagai alat buat meraih

keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tidak sedikit politisi yang masuk penjara, karena menyalah gunakan kekuasaan dan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Contoh, Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat masuk penjara bersama karena terlibat kasus Hambalang. Politisi lain dari Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi ada Jero Wacik mantan Menteri ESDM dan bekas Menteri Pariwisata itu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan senilai Rp 9,9 miliar. Nazaruddin bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, divonis 4 tahun 10 bulan penjara terkait dengan kasus suap Wisma Atlet. Andi Mallarangeng bekas Menteri Pemuda dan Olahraga era pemerintahan SBY dihukum 4 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek Hambalang. Angelina Sondakh bekas anggota Fraksi Partai Demokrat dan mantan Putri Indonesia dituntut 12 tahun bui, karena terbukti korupsi pada proyek Wisma Atlet Palembang. Sutan Bhatogana

anggota Fraksi Partai Demokrat, tersangka penerima suap di SKK Migas dan terkait dengan Rudi Rubiandini. Dari Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishaq bekas Presiden PKS dan anggota DPR divonis 18 tahun penjara karena kasus korupsi kuota impor sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi dinyatakan bersalah menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40 miliar dari pengusaha daging, Maria Elizabeth Liman (Tempo, 2014).

Sementara di Partai Golkar, Akil Mochtar bekas Ketua MK divonis seumur hidup karena terbukti memenangkan beberapa pilkada ketika dirinya menjabat Ketua MK. Zulkarnaen Djabar bekas anggota DPR divonis 15 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek pengadaan Al-Quran, Mei 2013 lalu. Rusli Zainal bekas Gubernur Riau dinyatakan bersalah dalam kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON dan melakukan korupsi terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada

2001-2006. Amran Batalipu bekas Bupati Buol divonis 7,5 tahun penjara karena menerima suap penerbitan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha di Buol untuk perusahaan milik pengusaha Hartati Murdaya (Tempo, 2014).

Sementara yang baru terjadi tahun ini, anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini merupakan orang pertama yang ditangkap oleh KPK pada tahun 2016. Operasi tangkap tangan perdana di era kepengurusan KPK jilid IV, di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo (CNNIndonesia, 2016).

Hal serupa terjadi pada Partai Hanura. Politikus Hanura Dewie Yasin Limpo di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa malam, 20 Oktober 2015 ditangkap KPK. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan Dewie dicokok karena diduga menerima suap sebesar Sin\$ 177.700 atau sekitar Rp 1,7 miliar terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten

Deiyai, Papua, tahun anggaran 2016 (Tempo, 2015).

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para politisi di atas bisa dimasukkan dalam kategori *Rente Seeking*, yaitu mencari keuntungan. Menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Fenomena sosial politik seperti bukanlah hal baru. Kasus seperti ini sudah lama terjadi – sejak Orde Baru sudah terjadi politisi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Fenomena *rent seeking* dikalangan politisi, yaitu elit partai politik, politisi yang duduk di legislatif dan eksekutif – tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, hal serupa terjadi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Otonomi daerah sebagai penjawantahan demokrasi lokal memberikan ruang bagi politisi – termasuk gubernur, bupati dan walikota untuk menggambilkan keuntungan, bahkan otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil di daerah.

Perjalanan *Rente Seeking*

Tidak hanya pengusaha yang melakukan *Rente*. Prilaku

mengejar *Rente* (*rent seeking behavior*) juga sudah terjadi dikalangan elit partai politik, baik yang sudah duduk di legislatif, eksekutif atau yang menjadi pengurus partai politik. Tindakan mereka, menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, mengantarnya masuk dalam masyarakat pemburu *Rente* (*rent seeking society*). Sering sekali elit partai politik mempengaruhi proses ekonomi melalui politik. Mereka menggunakan kuasa sebagai alat buat mempengaruhi keputusan ekonomi – hingga terjadi penyimpangan dalam ekonomi.

Rente menyabab ekonomi menjadi tidak efisien dan biaya ekonomi menjadi lebih mahal. Tidak hanya berdampak pada biaya produksi, masuk politik dalam proses ekonomi membuat kualitas produksi menjadi lebih rendah. Sebab biaya kualitas produksi diambil alih atau dialihkan kebiaya politik. Kondisi seperti itu sulit dilepaskan – karena rode ekonomi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia belum sepenuhnya diserahkan

kepada mekanisme pasar. Berbeda dengan negara modern yang sudah menerapkan sistem pasar murni. Negara yang baru lepas dari pemerintahan otoriter, belum bisa menerapkan mekanisme pasar murni. Pasar belum berdaulat dalam menentukan harga.

Kasus koalisi antara elit partai politik, pengusaha dan birokrasi dalam mengintervensi ekonomi sudah berlangsung cukup lama. Membutuhkan waktu cukup untuk melepaskan tradisi politik seperti di atas – sebab banyak menyangkut kepentingan pengusaha politik. Kasus Indonesia misalnya, reformasi baru terjadi pada level sukses politik, yaitu menurunkan Suharto dari kursi presiden. Kroni-kroni Suharto, sebagian malah masih menduduki jabatan politik dan mendirikan partai politik. Rachbani (2005) menjelaskan, perburuan *Rente* ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau

bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut jugaterjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu *Rente*.

Praktik berburu *Rente* ekonomi diasosiasikan dengan usaha mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor merupakan bagian dari praktik perburuan *Rente* ekonomi (Rachbani, 2005).

Rachbani (2005) menekankan, pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi, maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik. Teori yang mengkaji masalah itu dikenal dengan sebutan teori perburuan *Rente* ekonomi (*Theory of Economic Rent Seeking*). Teori tersebut menjelaskan, fenomena perilaku

pegusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, berupa monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak berwenang yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku usaha lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu *Rente* ekonomi biasanya merupakan perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan.

Dalam analisis ekonomi politik pengertian *Rente* menjadi penilaian yang negatif, karena *Rente* merupakan bentuk sangat mudah bagi seseorang atau suatu kelompok bisnis mendapatkan keuntungan, karena mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau privilege yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kondisi saat ini *Rente* semakin berkembang untuk kepentingan politik dan organisasi politik. Mencari keuntungan berdasarkan legitimasi politik yang sedang dikuasainya. Mereka tidak sungkan-sungkan berafiliasi, bergabung dan berkongsi, meskipun platform dan ideologi politik berbeda. Bahkan menyerukan kepada simpatisan,

konstituen dan rakyat sebagai pengikut – melakukan propganda dan menyatakan bermusuhan. Tapi, demi kepentingan mencari keuntungan mereka bisa bekerjasama (Rahim, 2013).

Konsep *rent seeking* dikembangkan Gordon Tullock sudah ada sejak tahun 1967. *Rent seeking* atau pemburu *Rente* teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, *rent seeking* bermakna sebagai suatu proses seseorang atau perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi politik, aturan atau regulasi dari pada melalui perdagangan. Hal serupa disampaikan Yoshihara Kunio yang melakukan penelitian *rent seeking* di kawasan Asia Tenggara. Ia menjelaskan, pemburu *Rente* adalah para kapitalis yang menjalin hubungan dengan pemerintah demi keuntungan bisnis. Mereka mencari peluang-peluang untuk penerima *Rente* yang diberikan pemerintah dengan menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu (Kunio, 1990).

Rente di sini didifinisikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu “kebaikan hati” pemerintah dengan sejumlah yang dibayar oleh si penerima kepada pemerintah secara pribadi kepada penolongnya. Pemburu *Rente* tidak hanya terjadi di Indonesia – tapi juga terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Di Filipina, pada masa pemerintahan Presiden Marcos kapitalis *Rente* dikenal dengan sebut kapitalis konco. Dalam berbisnis, kapitalis konco memperoleh keuntungan cukup besar – atas kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh atas hubungannya dengan penguasa, memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha. Di sini tidak terjadi persaingan sehat antar pengusaha dalam pasar.

Di Cina, kapitalis *Rente* disebut kapitalis birokrat. Ada tiga makna dari kapitalis birokrat. Pertama, kapitalis yang memegang jabatan birokrat, lalu mereka gunakan jabatan tersebut untuk akumulasi modal. Kedua, kalau tidak lagi memegang jabatan birokratis, mereka mempertahankan hubungan dengan erat dengan pemerintah

dan memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis. Ketiga, kapitalis yang mempunyai bisnis sendiri dan menjalankan sendiri. Sebenarnya yang dijalankan adalah bisnis orang lain (militer). Atau menggunakan militer sebagai mitra bisnis. Seperti bisnis militer seperti ini terjadi di negara-negara otoriter – di mana usaha militer dijalan oleh kapitalis. Atau sebaliknya, militer yang sudah purnawirawan atau aktif menjadi mitra bisnis kapitalis (Kunio, 1990).

Pembahasan *rent seeking* bukanlah hal baru. Pada masa ekonomi klasik – pembahasan *rent seeking* sudah ada. Pendekatannya berbeda – lebih pada ekonomi murni. Tidak berhubungan sama politik. Pemikiran tersebut berangkat dari pemikiran Adam Smith tentang pendapatan masyarakat. Seiring perubahan zaman, rent atau sewa yang dikemukakan Adam Smith berkembang lebih jauh. Digunakan dalam pendekatan ekonomi politik.

Adam Smith membebakan tiga bentuk pendapat. Pertama, keuntungan atau laba (*profit*), kedua, upah (*wages*) dan yang ketiga, sewa (*rent*). Laba atau

keuntungan biasanya diperoleh dari satu usaha atau bisnis yang mengandung risiko rugi. Sedangkan upah merupakan pendapatan yang diperoleh seseorang karena bekerja, berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Berbeda dengan laba, upah tidak mempunyai risiko rugi. Sementara sewa atau rent merupakan pendapatan yang paling mudah diperoleh dibandingkan laba atau upah. Sebab tidak mengandung risiko dan tidak perlu menggunakan keterampilan untuk memperoleh pendapatan (Rachbani, 2002).

Dari segi ekonomi, tiga bentuk sumber pendapatan ini tidak mengandung unsur negatif. Setelah masuk dalam pendekatan ekonomi politik, khususnya tentang *Rente* atau sewa baru timbul penilaian lain dan terjadi pengembangan makna. *Rente* ditransformasikan sebagai perilaku bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan cara menggunakan modal yang menjadi hak milik orang lain atau hak milik publik. Dalam pengertian ini, *Rente* diartikan lebih tajam dan menjadi

negatif, karena modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan berasal dari modal orang lain – bukan modal sendiri. Di dalam konsep ekonomi politik, perilaku seperti ini dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan modal kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat.

Dari penjelasan di atas bisa kita tarik ke kasus Indonesia. Di Indonesia, dalam mencari keuntungan pengusaha menggunakan kekuasaan yang dimiliki politisi, seperti elit partai, anggota legislatif dan elit eksekutif. Sebaliknya, politisi meminta jasa atas kekuasaan yang telah mereka berikan kepada penguasa. Mereka sama-sama mencari keuntungan. Fenomena politisi *Rente* menyebabkan bisnis menjadi tidak efisien, sehingga rakyat terbebani oleh kerugian publik dan risiko politik. Itulah sekarang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menanggung beban ekonomi yang diambil oleh politisi rent. Bila negara dan rakyat tidak sanggup menanggulangi beban ekonomi tersebut – maka pembangunan menjadi terhambat

atau berjalan tidak sesuai dengan perencanaan.

Melihat kasus-kasus yang terjadi, menunjukkan bahwa saat ini *Rente* berkembang pesat. Selain untuk kepentingan pribadi, *rent seeking* juga digunakan untuk kepentingan politik kelompok. Berdasarkan legitimasi politik, politisi tidak sungkan-sungkan berafiliasi, bergabung, berkongsi meskipun pada dasarnya berbeda platform dan ideologi. Tidak hanya ideologi, atas dasar persamaan kesamaan kepentingan yaitu memperoleh *Rente* – mereka meninggalkan kepentingan rakyat. Kedaulatan yang diperoleh melalui pemilu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok – tidak digunakan untuk kepentingan rakyat.

Kasus ini menyebabkan demokrasi menjadi mati dan tidak berguna. Sebab kedaulatan yang berasal dari dan digunakan untuk rakyat – tidak terjadi. Rakyat telah memberikan wewenang politiknya, kepada orang dan kelompok yang salah. Dengan menggunakan jargon “atas nama rakyat” atau kedaulatan rakyat – mereka mencari keuntungan materi.

Budaya Konsumen Politisi

Ada faktor penyebab lahirnya politisi *Rente*. Pertama budaya konsumen dikalangan politisi. Kedua menurunnya beberapa fungsi partai politik, menyebabkan partai politik tidak bisa bekerja secara maksimal. Lahirnya budaya konsumen di tak lepas dari berkembangnya paham kapitalisme dan liberalisme. Industrialisasi yang dikembangkan kaum kapitalis pada awal abad ke 19 – menjadi titik awal berkembangnya budaya konsumen. Kapitalis berusaha, produk-produk yang mereka produksi harus ada dalam kehidupan masyarakat. mereka mengdesain, produk-produk tersebut musti menjadi sebuah kebutuhan dan harus dimiliki oleh masyarakat, hingga timbul rasa atau hasrat untuk memiliki – dari sinilah awal lahirnya budaya konsumen.

Kondisi sosial seperti itu menyebabkan budaya konsumen menjadi jantung dari kapitalisme. Sebab keberlangsungan industri kapitalis ditentukan oleh budaya konsumen. Semakin tinggi budaya konsumen – peluang

keberlangsungan industri semakin besar. Untuk mempertahankan industri, kapitalis berusaha mempertahankan budaya konsumen dalam kehidupan masyarakat.

Lury (1998) meneliti tentang budaya konsumen di masyarakat Eropa-Amerika yang berkembang pada abad 20, menemukan bahwa budaya konsumen mempengaruhi sistem ekonomi kapitalis. Konsumen adalah bentuk dari budaya materi, yakni budaya pemanfaatan benda-benda. Konsumen diartikan sebagai tindakan melahap, menggunakan, makanan dan minuman (kamus saku Oxford). Diartikan sebagai tindakan rakus dan hasrat tinggi terhadap materi. Budaya konsumen dari kacamata budaya materi dapat dilihat sebagai konversi, lebih tepat dikatakan, 'prilaku manusia yang mengubah benda-benda untuk tujuan mereka'. Tujuan di sini bisa makna sebagai tujuan hidup – kepemilikan benda sebagai tujuan hidup.

Tidak sebatas pada prilaku manusia yang menjadi rakus terhadap kepemilikan benda-benda. Budaya konsumen menurut

Lury (1998), berkaitan kelangsungan sama produksi dan pasar yang merupakan rangkai dari sistem ekonomi. Budaya konsumen sebagai bentuk budaya materi dalam masyarakat Eropa-Amerika kontemporer membentuk gaya hidup. Istilah gaya hidup (*lifestyle*) sekarang ini kabur. Istilah gaya hidup memiliki arti sosiologis terbatas merujuk pada gaya hidup atau pola yang khas dari berbagai kelompok status tertentu. Dalam budaya konsumen kontemporer, istilah gaya hidup mengkonotasikan individualitas, ekspresi diri dan kesadaran diri yang semu. Tubuh, busana, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan, minuman, rumah, kendaraan dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari selera individualitas atas kepemilikan atau konsumen (Featherstone, 2005).

Gaya hidup menurut Weber dalam Featherstone (2005), persamaan status kehormatan yang di tandai dengan konsumsi terhadap simbol-simbol gaya hidup yang sama. Estetika realitas melatarbelakangi arti penting gaya yang didorong oleh dinamika pasar

modern dengan pencarian yang konstan akan adanya model baru, gaya baru, sensasi dan pengalaman baru. Gaya hidup yang ditawarkan berbagai media adalah ajakan untuk memasuki budaya konsumer. Budaya konsumen akan membentuk gaya hidup baru membuat manusia – hingga mereka berubah. Perubahan status sosial yang berasal dari kepemilikan materi – dianggap sebuah prestasi luar. Posisi sosial yang awalnya di bawah langsung naik ke atas, dari kelas bawah langsung naik ke kelas atas – derajat sosial menjadi naik. Mereka hadir sebagai manusia yang dipandang dan disegani oleh lingkungan atau masyarakat. Itu menyebabkan manusia berlomba-lomba mengumpulkan materi.

Kasus seperti itu membenarkan pandangan Karl Marx, bahwa materi bisa berubah perilaku manusia. Materi mempunyai nilai cukup tinggi – sebab materi mempunyai kekuatan untuk merubah budaya, sikap dan perilaku manusia. Menurut Karl Marx, sejarah umat manusia disejak zaman primitif dibentuk

oleh materi atau kebendaan. Awal sejarah manusia dimulai dengan adanya kepemilikan pribadi, kemudian menimbulkan pertarungan dan memperebutkan materi atau kekayaan ekonomi (Suhelmi, 2007).

Itulah yang terjadi sekarang pada elit partai politik di Indonesia. Masuknya budaya konsumen dalam gaya hidup – membuat politisi menjadi hedonisme. Di sistem ekonomi kapitalis, hedonisme merupakan kunci keberhasilan industri. Hedonisme harus dipertahankan, hingga menjadi budaya. Sekarang hampir tidak ada ruang dan waktu tersisa untuk menghindari diri dari serbuan berbagai informasi yang berurusan dengan konsumsi. Masyarakat tidak henti-hentinya disajikan berbagai informasi yang menstimulasi konsumsi melalui iklan di berbagai media cetak dan elektronik, termasuk media sosial. Tidak bisa dihindari, propaganda yang dilakukan kapitalis melalui iklan berhasil merubah pola konsumsi masyarakat – termasuk pola konsumsi politisi.

Akibatnya politisi berlomba-lomba memiliki materi secara

berlebihan. Bukan tanpa alasan, memiliki materi secara berlebihan dapat merubah status sosial dan memprosisikan dirinya sesuai jumlah materi yang dimiliki. Secara ekonomi politik, kekuasaan yang melekat pada diri elit partai politik mengandung nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan materi. Nilai ekonomi dikonversikan kepada kapitalis – hingga mendapat untung atau *Rente*. Keuntungan tersebut digunakan untuk mengumpulkan materi.

Selain merubah prilaku, budaya konsumen merubah orientasi politik – hingga terjadi disorientasi politik. Itu terlihat dari berbondong-bondongnya masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial ingin bergabung dengan partai politik. Tujuannya sangat beragam. Sesuai kepentingandan tujuan masing-masing. Pengusaha misalnya, selain mau meraih kekuasaan politik – tujuan lain bergabung dengan partai politik adalah mengembangkan usaha. Setelah menjabat kekuasaan – mereka akan menggunakan

kekuasaan untuk kepentingan bisnis. Masyarakat marjinal, juga punya tujuan lain atau tujuan tersembunyi bergabung dengan partai politik, yaitu merubah status sosial dan memperbaiki pendapatan.

Teori partai politik menjelaskan, kehadiran partai politik bertujuan untuk memperbaiki dan menata negara menjadi lebih baik. namun realita berkata lain. Liberalisme politik memberikan ruang yang sangat besar semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam politik. Dikhawatirkan, implementasi liberalisme politik dijadikan oleh sebagian masyarakat untuk tujuan lain. Partai politik tidak dijadikan sebagai alat memperbaiki negara. Namun untuk mengumpulkan materi dan meningkatkan status sosial ekonomi.

Menurunnya Fungsi Partai Politik

Selain disebabkan budaya konsumen yang melakat pada diri elit partai politik menyebabkan mereka menjadi politisi *Rente*. Penyebab kedua adalah menurunnya beberapa fungsi partai politik. Menurunnya beberapa fungsi partai politik turut

andil dalam melahirkan politisi *Rente*. Menurunnya beberapa fungsi partai politik menyebabkan lahirnya elit partai politik berkapasitas rendah dan tidak berintegritas. Integritas adalah orang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang pegang, dengan kata lain setia kepada kebenaran. Dari segi elit partai politik, integritas dapat dilihat dari perilaku dan tindakan, apakah sesuai dengan standar etika. Elit partai politik seperti ini senantiasa jujur, bersikap adil, responsif terhadap kebutuhan publik, dan kompeten untuk menepati janji. Elit partai politik yang berintegritas juga ditunjukkan dalam kemampuan memecahkan masalah dan gaya hidup sederhana.

Menurunnya fungsi partai politik menjadi persoalan dalam melahirkan kader-kader beretika. Jika partai politik tidak bisa mengambilkan fungsinya sesuai dengan kaedah-kaedah. Sulit rasanya melahirkan kader dan elit partai yang baik. Dalam wujudkan kader dan elit partai berintegritas – kehadiran partai politik dalam sistem politik seperti pasangan

suami istri atau ibu dan bapak yang sedang merencanakan keturunan. Untuk melahirkan keturunan yang sempurna secara fisik dan mental – semuanya harus dipersiapkan secara maksimal. Pasangan suami istri harus punya program.

Kalau Sukarno, elit-elit partai politik yang baik adalah politisi yang berjiwa nasionalis – bukan berjiwa perampok. Berjiwa nasionalis, sebuah jiwa yang rela berkorban untuk bangsa dan negara – bukan sebaliknya mengeruk keuntungan dari bangsa dan negara untuk sendiri atau kelompok.

Setidaknya ada delapan fungsi partai politik. *Pertama*, fungsi sosialisasi politik, yaitu tranfer nilai-nilai politik yang berlaku dalam sebuah negara atau masyarakat. Transfer nilai biasanya berlaku sejak masih anak-anak sampai dewasa. *Kedua*, partisipasi politik. Memobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. *Ketiga*, rekrutmen yaitu menarik masyarakat untuk menjadi anggota partai dan nantinya akan dipersiapkan menjadi elit partai

dan perwakilan partai di legislatif serta menjadi elit di lembaga eksekutif – menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota (Mas'ood dan MacAndrew, 2001). *Keempat*, kaderisasi. Setelah melakukan rekrutmen politik. Partai politik harus melakukan kaderisasi terhadap anggota dan anggota akan menduduki jabatan politik di legislatif dan eksekutif.

Kelima, komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, hingga keseimbangan siaran pendapat dalam masyarakat berkurang. Fungsi ini dijalankan bersama dengan struktur lain, bisa dengan lembaga-lembaga komunikasi yang bekerjasama dengan partai politik. Atau partai politik sendiri secara langsung menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Dan menyampaikan informasi atau persoalan dalam masyarakat ke pemerintah. Dalam negara arus informasi selalu bersifat dua arah,

artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai politik dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dengan yang diperintah (Budiardjo, 1982).

Keenam, artikulasi kepentingan. Partai politik mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang dibentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individu kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah, atau masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Dalam konteks partai politik, partai politiklah yang melaksanakan hal-hal tersebut. *Ketujuh*, agregasi kepentingan, yaitu cara tututan yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam masyarakat demokras, partai politik merumuskan program politik dan

menyampaikan usulan-usulan pada legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintah. Terjadi tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, menawarkan pemenuhan kepentingan mereka – kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

Kedelapan, pembuatan kebijakan. Fungsi ini menjelaskan, jika partai politik ingin terlibat dalam merumuskan kebijakan – harus bisa merebut kekuasaan secara konstitusional. Sesudah mendapatkan kekuasaan dalam pemerintah, baik dalam legislatif maupun eksekutif, baru memberikan pengaruh dalam membuat kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan roda pemerintah (Bari dan Amir, 2005).

Dalam kasus ini, fungsi partai yang harus ditekankan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Tiga fungsi tersebut berkaitan dengan budaya politik anggota dan pengurus partai politik. Kalau ketiga fungsi ini tidak berkerja dengan baik, partai politik akan melahirkan politisi *Rente*.

Fungsi sosialisasi politik punya peranan sangat besar dalam menentukan sikap mental anggota partai dalam interaksi politik. Menurut Alfian, sikap mental akan mempengaruhi dan melahirkan kegiatan sistem politik, sistem ekonomi, sosial, seni, ilmu pengetahuan dan lain-lain (Alfian, 1982).

Sikap mental tersebut sangat ditentukan oleh budaya politik. Budaya politik menurut Almond adalah suatu pola orientasi yang khusus dari tindakan politik yang tertanam dalam setiap sistem politik. Sementara menurut Verba dan Almond, budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, termasuk sikap individu terhadap peranan yang terdapat dalam sistem politik (Maksudi, 2012). Pendapat lain, Kantaprawira (1999) budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik sendiri adalah interrelasi antara manusia yang

menyangkut soal kekuasaan aturan dan wewenang.

Dari penjelasan teori budaya politik di atas bisa dikorelasikan, bahwa partai politik bagian dari sistem politik suatu negara mempunyai peranan dalam membentuk sikap mental masyarakat – termasuk anggota partai. Buruk atau baik sikap mental anggota partai atau politisi ditentukan oleh budaya politik partai. Salah satu unsur yang menentukan budaya politik partai yang nanti akan merubah dan menentukan sikap politik anggota partai dan masyarakat adalah ideologi partai (Alfian, 1982). Ideologi partai menjadi landasan bagi anggota partai – termasuk politisi dalam bersikap dan berpikir.

Setelah dilakukan sosialisasi, partai politik berideologi nasionalis anggotanya akan bersikap sesuai paham Nasionalis. Sikap politik yang sangat mencintai negara – cinta negara menjadi dasar dalam sikap politik. Begitu pula partai politik berideologi Islam – anggota bersikap sesuai kaedah-kaedah Islam. Partai mentransfer nilai-nilai Islami, seperti sikap *qona'an* (rela menerima apa ada), dan sikap

zuhud (sikap menjauhi kedunia – tidak berlebihan) dalam arti menjauh diri dari budaya konsumen. Sifat *zuhud* membuat manusia tidak menjadi tamak dan rakus. Sikap seperti ini tidak terjadi dikalangan politisi berideologi Islam. Tidak sedikit politisi Islam hidup bermawah-mewah atau menjadi manusia berbudaya konsumen. Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa fungsi sosialisasi partai tidak berjalan baik. Partai gagal mendidik anggota hingga tidak bersikap berdasarkan ideologi partai.

Fungsi lain yang tak jalan secara maksimal adalah fungsi kaderisasi. Partai gagal melakukan pengkader terhadap anggotanya. Berdasarkan teori partai, partai harus mendidik anggota menjadi politisi handal dan profesional – punya kemampuan memadai ketika duduk di eksekutif dan legislatif. Dari sisi kepribadian, merubah sikap mental anggota hingga bersikap sesuai nilai yang diyakini partai.

Kaderisasi membutuhkan proses panjang. Merubah kepribadian bukanlah pekerjaan mudah. Menanamkan ideologi

dalam diri anggota partai – sampai ideologi menjadi sebuah keyakinan dan terimplementasi dalam sikap mental membutuhkan waktu cukup lama. Dalam menyebarkan ideologi, partai membutuhkan kader yang sangat paham tentang ideologi partai secara mendalam. Kader tersebut akan mentransfer ideologi ke kader lain. Penyebaran ideologi partai musti mereta, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat DPP, semuanya harus memahami ideologi partai.

Dalam implementasi program partai – harus sejalan dengan ideologi partai. Anggota yang tidak memahami ideologi partai – mereka akan bertindak atau mengimplementasi program partai tidak sesuai dengan ideologi partai. Begitu pula ketika menjadi elit di eksekutif dan legislatif. Mereka akan membuat kebijakan-kebijakan tidak sesuai ideologi partai. Dikhawatirkan akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai. Bila sudah masuk pada tahap seperti ini – partai politik akan kehilangan ‘roh’. Partai politik hanya menjadi sebuah lembaga. Lembaga (partai politik) hanya

digunakan anggota partai semata-mata untuk meraih kekuasaan. Setelah berhasil meraih kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan sesaat. Sebab, tujuan anggota partai terjun kepolitik pun sesaat. Partai politik hanya digunakan sebagai kendaraan politik untuk meraih kepentingan pribadi. Ketika kepentingan pribadi sudah berhasil dicapai – mereka akan meninggalkan kepentingan partai. Tidak menggunakan partai politik sebagai alat untuk memajukan bangsa. Saat ini tidak sedikit anggota dan elit politisi politik – ketika berinteraksi sikap mentalnya bertentangan sama ideologi partai.

Fungsi partai politik lain yang berkaitan dengan sikap mental adalah rekrutmen politik. Dari pendekatan struktur dan fungsional, pendekatan rekrutmen politik lebih bersifat administrasi. Unsur penting yang sering terjadi dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik unsur ekonomi politik dan transaksional. Kehadiran kedua unsur tersebut merusak fungsi rekrutmen partai politik. Bagi pengurus partai yang tidak berideologi atau tak menjiwai

ideologi partai – cenderung memasukan unsur ekonomi politik dan transaksional politik ketika menjalan fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen politik banyak berdasarkan feodelisme, berdasarkan kedekaan kekeluargaan, transaksional, pribadi dan bisnis. Tidak sedikit para pengusaha menjadi politisi – pada hal mereka tidak punya latar belakang politik dan tidak mempunyai jenjang karir dipolitik, termasuk terlibat dalam pengkaderan politik. Pengusaha masuk dalam politik, karena mempunyai kekuatan finansial. Lalu diajak ajak masuk dalam politik dan diberikan jabatan dalam struktur partai. Pada tingkat lanjut, terjadi transaksi politik – pengusaha mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Sebab pengusaha telah berjasa dalam pendanaan partai politik.

Rekrutmen politik seperti ini melahirkan politisi *Rente*. Terjadi transik politik antara pengusaha dan pengurus partai politik. Pengusaha memberikan dana kepada partai politik – dengan kompensasi jabatan politik. Penguasa langsung menduduki

jabatan strategis dalam partai politik. Ketika partai menang dalam pemilu, pengusaha memperoleh jatah ekonomi dari proyek pembangunan. Minimal mereka memperoleh saat mengembangkan usaha. Ketika pengusaha terjerat kasus – termasuk kasus yang berkaitan bisnis. Pengurus partai berusaha melindungi pengusaha tersebut. Sebab pengusaha merupakan aset ekonomi partai dan elit partai politik, oleh sebab itu pengusaha tersebut harus dilindungi. Jika tidak dilindungi – bisa berdampak buruk terhadap pendapatan pengurus dan elit-elit partai. Termasuk dana operasional partai politik – partai politik tidak bisa bekerja. Ketergantungan partai politik pada penguasa, membuat partai politik menjadi tidak mandiri dan mandul.

Penutup

Kehadiran politisi *Rente* akan merusak tatanan perpolitikan. Korupsi dalam kehidupan bernegara semakin merajalela. Politisi *Rente* menciptakan ruang-ruang korupsi. Sebab, diruang tersebut mereka bisa memperoleh keuntungan atau *Rente*. Pada tataran politik praktis, tindakan-

tindakan politik menjadi lepas dari etika politik. Bagi politisi *Rente*, etika politik dianggap nilai yang menghambat proses politik. Dari sisi ekonomi politik, politisi *Rente* membuat biaya politik menjadi mahal dan mengganggu proses ekonomi. Sebab dalam proses ekonomi ada aksi politik (kekuasaan) yang bermain dalam menentukan harga – di mana harga tidak ditentukan oleh pasar. Akibatnya, biaya produksi menjadi mahal dan kualitas produksi menjadi rendah. Itulah yang terjadi pada proyek pembangunan yang dijalankan swasta menjadi mitra pemerintah.

Selama politisi *Rente* masih ada di Negeri ini – sulit menciptakan proses ekonomi yang alami, yaitu proses ekonomi tanpa intervensi politik. Dampaknya, pembangunan berjalan lambat – tidak sesuai target. Termasuk tidak sesuai dengan harapan rakyat. Penangan politisi *Rente* tidak bisa menggunakan pendekatan kelembagaan atau struktur. Sebaiknya menggunakan pendekatan *behavior* atau tingkahlaku. Yang perlu diubah bukan lembaga atau sistem – tapi

budaya politik dan sikap mental objek yang berperan menjalankan sistem yang ada dalam lembaga tersebut. Dilihat dari ketersediaan lembaga dan sistem – di Negeri ini semuanya sudah tersedia. Termasuk perangkat undang-undang penunjang untuk bekerja lembaga dan sistem. Namun realitas berkata lain. Lembaga dan sistem tetap tidak berjalan maksimal. Itu disebabkan, objek yang ada dalam lembaga dan sistem yang berfungsi sebagai penggerak punya sikap mental tidak baik.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1982. *Politik: Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Bari, Azed, Abdul dan Ami Makmur Amir. 2005. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Baswir, Revrison. 1999. *Dilema Kapitalis Perkoncoan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Mirim. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Featherstone, Mike. 2005. *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- J. Rachbini, Didik. 2002. *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2005. "Analisis Ekonomi Pemburu Rente". Opini, *Suara Merdeka*, Senin, 28 November 2005.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalis Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Lury, Celia. 1998. *Budaya Konsumen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maksudi, Iriawan, dan Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'oed, Mohatar dan Colin MacAndrew. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Rahim, Taufiq Abdul. 2013. "Fenomena 'Politik Rente'". *Koran Serambi Indonesia*, Selasa, 30 April 2013.
- Shahab, Alwi. 1998. "VOC Bangrut akibat Korupsi dan Monopoli, Kolom". *Tabloid Berita Mingguan Adil*, No. 28 Tahun ke 66, edisi 15 – 21 April 1998.
- Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- www.CNNIndonesia.com. 2016. "KPK Tangkap Legislator PDIP Damayanti Wisnu Putranti". Rabu, 13 Januari 2016
- www.tempo.co. 2014. "Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi". Selasa, 23 September 2014.
- www.tempo.co. 2015. "Begini Kronologi KPK Tangkap Dewie Yasin Limpo". Rabu, 21 Oktober 2015.